

**BAB IV**  
**ANALISIS PEMBELAHAN SUARA KYAI DALAM**  
**PILKADES BESITO TAHUN 2019**

**4.1 Peran Politik Kyai Dalam Pemilihan Kepala Desa Besito Tahun 2019**

Peran, menurut ilmu sosial, berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Termasuk yang sudah dilakukan oleh beberapa kyai di desa Besito dalam melakukan peran politiknya. Secara historis kyai dalam proses sosial memiliki posisi sangat strategis dan memainkan peran penting dalam setiap perubahan. Keterlibatan kyai tidak hanya terbatas dalam perkembangan keagamaan, sosial dan kultural saja, di luar itu kyai juga terlibat dalam perkembangan proses politik sejak Indonesia belum merdeka, dan sampai masa pembangunan sekarang ini (Ummatin, 2002).

Kyai dan politik bukanlah masalah baru di Indonesia. Ini karena kepemimpinan kyai yang multidimensi. Di satu sisi ia adalah seorang alim yang mengetahui seluk beluk ilmu agama. Di sisi lain, ia juga adalah salah seorang yang memiliki pengaruh dan pengikut, sebuah prasyarat penting untuk memasuki gelanggang politik.

Orientasi para kyai dalam terjun ke dunia politik adalah menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Konsep *amar ma'ruf nahi munkar* ini diletakkan dalam pengertian yang luas, yaitu pengawasan dan evaluasi. Dalam pandangan kyai, konsep ini memiliki peran signifikan, karena dalam kenyataannya tatanan sosial-politik yang ada banyak yang tidak sejalan dengan ajaran agama. Karena itulah para kyai merasa perlu untuk terjun ke dalam dunia politik untuk mewujudkan kontrol kekuasaan yang sewenang-wenang dan menyimpang dari aturan moral, hukum maupun aturan agama (Patoni, 2007).

Selain itu, konsep *amar ma'ruf nahi munkar* ini hendaknya juga dipahami dalam cakupan dan pengertian yang luas, yaitu mewujudkan perbaikan sistem pendidikan, penegakan supremasi hukum, meningkatkan kesejahteraan rakyat,

dan memprioritaskan pembangunan bagi rakyat. Meskipun demikian, masuknya para kyai ke dunia politik tidak selalu membawa implikasi yang menggembirakan. Misalnya pesantren yang tak terurus dengan baik, ataupun fungsi-fungsi sosial-keagamaan kyai yang sedikit banyak terdegradasi.

Di dalam masyarakat Islam, kyai merupakan salah satu tokoh elit yang mempunyai kedudukan sangat terhormat dan berpengaruh besar pada perkembangan masyarakat tersebut. Kyai menjadi salah satu elite strategis dalam masyarakat karena ketokohnya sebagai figur yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai ajaran Islam. Lebih dari itu, secara teologis ia juga dipandang sebagai pewaris para Nabi (*waratsatul al-anbiya*). Tidak mengherankan jika kyai kemudian menjadi sumber legitimasi dari berbagai keagamaan, tapi juga hampir dalam semua aspek kehidupannya. Pada titik inilah kita dapat melihat peran-peran strategis kyai, khususnya dalam aspek kehidupan politik di Indonesia, termasuk dalam proses politik itu sendiri.

Pro-kontra seputar peran kyai dalam dunia politik praktis masih menjadi perbincangan dalam masyarakat. Sebagian kalangan berpendapat bahwa kyai, seharusnya cukup berperan sebagai pengayom umat saja, terutama dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu, lebih tepat jika ia menghindarkan diri dari kehidupan politik. Adapula yang mengatakan sebaliknya, tidak ada alasan bagi kyai meninggalkan politik praktis sebab berpolitik merupakan bagian kehidupan agama itu sendiri. Namun, persoalan yang cukup pelik adalah ketika elite agama atau kyai memainkan peran ganda antara agamawan di satu sisi dan politikus di sisi lain yang di perankan dalam waktu yang bersamaan. Muncul pertanyaan, apakah mungkin produk-produk pemikiran dan tindakan elit agama bisa bebas dari nilai-nilai yang mewarnai pandangan hidup mereka.

Dari persoalan tersebut sebenarnya ada sebagian masyarakat yang mengharapkan posisi dan peran kyai berdiri independen tidak ikut dalam kegiatan politik praktis, tidak terkontaminasi oleh hingar bingar dan panasnya perpolitikan desa. Kehadiran kyai ini diharapkan akan dapat memberikan kesejukan dan kedamaian serta dapat mendinginkan panasnya arus politik dan menjadi kekuatan moral dalam kehidupan perpolitikan dan jalannya pemerintahan di Indonesia. Di

sisi lain ada pula sebagian besar masyarakat yang mengharapkan peran kyai atau elite agama berperan lebih signifikan agar dapat mengatasi persoalan-persoalan dan kritis yang terjadi di Indonesia.

Dalam perbincangan seputar peran politik kyai dalam politik yang tumbuh dan berkembang khususnya pada masyarakat desa Besito, akan selalu melibatkan persinggungan wacana antara agama dan politik ini seperti terlihat pada peran-peran yang dimainkan sejumlah kyai dalam panggung politik praktis. Ketika panggung politik kita diwarnai oleh hal-hal seperti itu maka diperlukan pendidikan politik yang diharapkan dapat diteladani oleh masyarakat. Demokrasi tidak hanya berbicara pada tataran legal formal selain itu yang tak kalah pentingnya adalah masalah nilai dan sikap seperti bagaimana legowo ketika menyikapi kekalahan dalam pemilihan umum dari tingkat pusat hingga desa (pilkades). Nilai-nilai dalam menyikapi kekalahan itulah yang hingga kini masih belum banyak dimiliki oleh masyarakat kita. Kyai yang diharapkan mampu memberi contoh yang baik justru memberikan contoh yang buruk. Lalu kalau sudah tidak ada contoh yang baik ke mana masyarakat harus belajar.

Di dalam ilmu politik, pendidikan politik atau sosialisasi politik diartikan sebagai proses, oleh pengaruh mana seorang individu bisa mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan sifat persepsi mengenai politik serta reaksi terhadap gejala-gejala politik. Proses pendidikan politik atau sosialisasi politik biasanya berlangsung dari kecil hingga dewasa. Namun saat ini yang dapat disaksikan dalam perpolitikan Indonesia ialah kegiatan saling berdebat dan saling menjatuhkan yang kemudian berujung pada pembelahan suara di kalangan masyarakat. Ya seperti itulah panggung politik kita saat ini. Banyak pemilihan umum hingga pemilihan kepala desa yang berbuntut pada kericuhan secara halus (tidak saling sapa) maupun kasar (anarkis) yang kemudian dibutuhkan sosok yang mampu meredam dan sebagai kontrol sosial di masyarakat salah satunya adalah kyai.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, sosialisasi politik merupakan dari kajian politik dalam pengertian proses. Oleh karena itu, pengertian sosialisasi politik senantiasa berkaitan dengan segenap proses dalam kehidupan politik.

Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal dan informal maupun tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat. Adapun bentuk dan metode sosialisasi politik salah satunya yaitu pendidikan politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses penyampaian pesan antara si pemberi dan si penerima pesan. Melalui proses ini anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, simbol, norma termasuk melalui kegiatan kursus, diskusi, pengajian dan lain sebagainya. Dalam konteks pemilihan kepala desa pendidikan politik ini dapat dijadikan ajang untuk meraih dukungan dari anggota masyarakat melalui tokoh-tokoh elite yang ada di desa itu termasuk salah satunya yaitu kyai.

Kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada kyai dalam hal mengikuti apa yang dikatakan dan dilakukan kyai bukan hanya dalam masalah agama saja, tetapi juga masalah politik. Masyarakat biasanya mengikuti apa yang dipilih oleh kyai yang sudah terbukti dapat dipercaya dan konsisten dalam mendukung salah satu pihak. Apalagi dalam panasnya pemilihan kepala desa hal ini menjadi pusat perhatian masyarakat desa. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa kyai memanfaatkan posisi sentral dalam masyarakat desa guna memperoleh simpati masyarakat untuk mendukung salah satu calon kepala desa Besito tahun 2019. Simpati masyarakat diperoleh dari pengajian, ceramah atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan agama Islam. Dengan alasan begitu masyarakat akan tergugah jika melakukan hal-hal baik dan sesuai ajaran agama Islam. Begitu mendapat simpati dari masyarakat lalu dimanfaatkan oleh kyai untuk memberi restu dan dukungan terhadap salah satu calon kepala desa.

Bagaimanapun, arus modernisasi telah sedikit banyak membawa pergeseran pada peran kyai sehingga kultur yang selama ini tumbuh berkembang kemudian mengalami kemunduran akibat perkembangan global. Perubahan kyai dapat kita lihat dengan sosok kyai yang dahulu disegani dan berpengaruh karena memiliki kharisma yang jarang dimiliki orang lain, mulai bergeser ketika mereka merambah ke wilayah politik dengan ikut berperan dalam kegiatan politik praktis.

Kepercayaan politik masyarakat merupakan sikap masyarakat itu sendiri, dalam artian masyarakat mampu menilai baik dan buruknya dari pelaksanaan sistem politik yang dijalankan oleh suatu pemerintahan, sehingga masyarakat mampu mengambil sikap untuk ikut serta dalam artian yang aktif dalam pelaksanaan politik tersebut, atau hanya sebagai pelaku pasif dari kebijakan-kebijakan politik yang disahkan oleh pemerintah. Jadi, pada dasarnya kepercayaan politik merupakan keyakinan yang dimiliki oleh segenap elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga dan mempertahankan keutuhan bangsa itu sendiri, sehingga akan tercipta sikap saling percaya antara masyarakat dengan pemerintah yang menjadi ujung tombak berjalannya sebuah pemerintahan. Sedangkan kepercayaan masyarakat terhadap elite politik pada dasarnya adalah anggapan atau keyakinan bahwa para elite politik yang mewakili kepentingan masyarakat dalam pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan program-program yang pada akhirnya untuk kepentingan rakyat/warga desa.

Pada penelitian yang dilakukan di Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus ini, peneliti lebih menenkankan pada objek tertentu yaitu keberadaan kyai pada suatu daerah tertentu sebagai subjek yang akan dihubungkan dengan pengaruhnya terhadap politik pemilihan kepala Desa Besito Tahun 2019. Dimana kepala desa merupakan seorang yang dapat memimpin pemerintah desa dan melaksanakan segala tugas yang dibebankan oleh pemerintah desa dan melaksanakan segala tugas yang dibebankan oleh pemerintah yang lebih atas membimbing dan mengawasi segala usaha dan kegiatan masyarakat dan organisasi-organisasi serta lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa selain itu kepala desa orang yang bergerak lebih awal, memelopori, mengarahkan, membimbing, menuntun dan menggerakkan masyarakatnya melalui pengaruhnya dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat desa yang dipimpinnya. Sehingga sangat penting dilakukannya pemilihan kepala desa yang bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang dapat bersaing dalam pilkades untuk memimpin desa. Pilkades dilakukan secara langsung oleh masyarakat dengan memilih calon kepala desa yang dianggap mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunan bagi desanya.

Dampak keterlibatan kyai dalam pilkades di Desa Besito tahun 2029 dapat dibagi menjadi 3 hal, dampak bagi kandidat, bagi kyai dan dampak bagi masyarakat : Kyai mempunyai peran ganda, sebagai elit lokal keagamaan dan elit lokal politik. Bagi kandidat, dengan merangkul kyai diharapkan akan mendapatkan dukungan suara yang signifikan dari para pengikut kyai di Desa Besito, hal ini sangat bergantung pada “kinerja” kyai pendukung kandidat. Umumnya ini terjadi karena terdapat kyai yang menjadi aktor dan kyai partisipan. kyai aktor, dengan sendirinya akan mempengaruhi pilihan politik pengikutnya. Sedangkan kyai partisipan akan menyerahkan pilihan politik pengikutnya sesuai dengan pilihannya sendiri.

Keterlibatan kyai juga berimplikasi bagi masyarakat. Kehadiran tokoh agama (kyai) dalam politik juga semakin mengokohkan peran posisi ulama di tengah masyarakat. Kyai tidak lagi hanya mengurus masalah-masalah profan saja. Kyai kini mempunyai tugas dan tanggung jawab mendampingi dan mendidik masyarakat agar melek politik. Politik sekarang tidak hanya menjadi lahan garap tokoh-tokoh politik saja, melainkan menjadi hal yang biasa dan menjadi milik siapa saja yang mau dan peduli mengenai masa depan daerah termasuk di dalamnya adalah tokoh agama (kyai).

#### **4.2 Implikasi Pembelahan Suara Kyai dalam Pemilihan Kepala Desa Besito Tahun 2019**

Di dalam buku “*ACTION RESEARCH*” dalam PENDIDIKAN (Antara Teori dan Praktik). Peneliti menemukan teori Sosiometri dalam Hubungan Sosial. Kata sosiometri berasal dari bahasa Latin "socius," yang berarti sosial dan bahasa Latin "metrum," yang berarti ukuran (measure). Sosiometri adalah cara untuk mengukur tingkat keterkaitan antara orang-orang. Pengukuran keterkaitan dapat berguna tidak hanya dalam penilaian perilaku dalam kelompok, tetapi juga untuk intervensi yang membawa perubahan positif dan untuk menentukan tingkat perubahan. Dalam kelompok kerja, sosiometri dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengurangi konflik dan meningkatkan komunikasi karena memungkinkan

kelompok untuk melihat dirinya secara obyektif dan menganalisis dinamika tersendiri. Ini juga merupakan alat yang ampuh untuk menilai dinamika dan perkembangan dalam kelompok dikhususkan untuk terapi atau pelatihan (Winaryati, 2021).

Sosiometri sebagai alat untuk mengukur hubungan sosial pada anak-anak dan orang dewasa dengan berbagai konteks sosial. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan pengertian sosiometri adalah suatu tehnik untuk mengumpulkan data untuk mempelajari hubungan sosial individu di dalam kelompok, sebagai cara untuk mengukur tingkat keterkaitan di antara manusia, yang merupakan hubungan sosial seorang individu dengan individu lain, struktur hubungan individu dan arah hubungan sosialnya dalam suatu kelompok. Dengan kata lain sosiometri merupakan studi tentang hubungan interpersonal dalam suatu populasi. Peneliti memiliki data yang kuat, untuk melakukan intervensi yang tepat. Sosiometri didasarkan pada kenyataan bahwa orang membuat pilihan dalam hubungan interpersonal. Setiap kali orang berkumpul, mereka tentu akan membuat pilihan di mana seseorang dapat diterima dalam suatu kelompok, dapat menentukan pilihan tentang siapa yang dianggap ramah dan yang tidak, yang merupakan pusat perhatian untuk diperhitungkan dalam suatu kelompok, atau ditolak, dan yang terisolasi. Moreno dalam Winaryati (2021) mengatakan, pilihannya adalah fakta mendasar dalam semua hubungan manusia yang sedang berlangsung, pilihan orang dan pilihan suatu hal. Suatu pilihan tidak tergantung apakah ada motivasi atau tidak, apakah rasional atau tidak rasional, dan tidak memerlukan justifikasi khusus, yang terpenting adalah urutan fakta. Sosiometri memungkinkan kita untuk mengukur, memetakan dan membangun hubungan sehingga kekuatan dalam suatu organisasi terlihat dan dapat dieksplorasi. Sosiometri adalah alat penting bagi orang untuk membangun jaringan kelompok matang dan perilaku hubungan yang positif. Sociometrist menggunakan berbagai aksi-alat untuk menampilkan dinamika kelompok, jaringan sosial sosial, emosional dan hubungan psikologi dalam kelompok. Ada kekuatan sehingga semua terlihat, karena setiap anggota kelompok dapat melihat apa yang terjadi di dalam kelompoknya. Berbekal informasi ini, kelompok kelompok dan individu

dapat memilih apakah akan membuat perubahan berfungsi sebagai kelompok yang lebih dinamis dan sukses karena mereka menerapkan strategi baru, sistem dan struktur.

Dengan demikian, teori Sosiometri dalam Hubungan Sosial dapat digunakan untuk menilai hubungan antar individu satu dengan individu lainnya dalam konteks pemilihan kepala desa. Bagaimana masyarakat desa mampu menilai kinerja pemerintah desa, mengurangi resiko terjadinya konflik sebelum dan sesudah pilkades dan membentuk masyarakat desa yang solid. Dengan begitu, masyarakat mampu menilai apa yang dilakukan oleh elite / tokoh masyarakat itu benar dan salah dari tingkah laku yang dilakukannya. Dalam penelitian ini, yang menggunakan kyai sebagai aktor utama karena dianggap memiliki kemampuan spesial jika dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Kyai dapat berperan sebagai aktor yang terlibat dalam memberikan dukungan kepada calon yang dipilihnya dan juga kyai dapat berperan sebagai kontrol sosial didalam masyarakat atau pengendali sosial jika terjadi konflik saat menjelang dan sesudah pemilihan kepala desa.

Masyarakat dimanapun dan kapanpun akan selalu membutuhkan pemimpin yang menguasai mereka karena kekuasaan pada dasarnya adalah kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan pemilik kekuasaan itu sendiri, yang terkadang menjadi bagian dari tujuan kelompok. Kekuasaan pemimpin di masyarakat, tidak akan selamanya dimiliki seseorang pemimpin karena kepemimpinan dibatasi oleh suatu priode kekuasaan atau usia pemimpin itu sendiri dalam hidupnya. Jika priode kekuasaan yang dimiliki pemimpin telah habis atau usia pemimpin telah mencapai batasannya, maka kekuasaan dan kepemimpinan harus dicarikan pengganti.

Proses pergantian pemimpin atau yang disebut suksesi kepemimpinan, dapat dilakukan dengan berbagai pola, diantaranya :

1. Pola Dinastik, yaitu dengan sistem penunjukan atau pewarisan. Dalam pola ini, seorang pemimpin mendapatkan jabatan pemimpin sebagai warisan dari pemimpin sebelumnya.



2. Pola Pemilu, yaitu dengan cara memilih seorang pemimpin berdasarkan hasil pemilihan atau mendapatkan suara terbanyak dari para pemilih yang memberikan dukungan kepada para calon pemimpin, baik dalam bentuk pemilihan langsung maupun tidak langsung.
3. Pola Kudeta, yaitu suksesi kepemimpinan yang dilakukan dengan cara mengganti pemimpin sebelumnya secara paksa, karena penggantinya adalah pemimpin yang memiliki dukungan dan kekuatan.
4. Pola People Power, yaitu dengan dengan penggunaan kekuatan keamanan (fisik) untuk menegakkan kekuasaan politik.

Suksesi kepemimpinan masyarakat desa, dilaksanakan oleh seorang kepala desa yang dipilih rakyat secara langsung melalui mekanisme PILKADES (Pemilihan Kepala Desa) terhadap calon kepala desa. Pemenang pemilihan tersebut akan memperoleh masa jabatan selama 6 tahun. Prosedur PILKADES menurut PP No.72 Tahun 2005 pada pasal 43 disebutkan : *BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan. BPD kemudian memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.*

Pada pasal 47 sampai 52 disebutkan bahwa untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak dan disahkan menjadi Kepala Desa dengan diberikan Surat Keputusan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih oleh Bupati/Walikota.

Pemilihan kepala desa menjadi konsensus politik nasional, yang merupakan salah satu instrumen penting penyelenggaraan pemerintah setelah digulirkan Otonomi Desa di Indonesia yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa. Hal ini jika dilihat dari perspektif desentralisasi, pilkades tersebut terobosan baru yang bermakna bagi proses konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. Pemilihan kepala desa akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses demokrasi untuk menentukan kepemimpinan di tingkat lokal.

Pada dasarnya pilkades merupakan pemilihan kepala desa yang berasaskan LUBERJURDIL, yang mampu mengemban amanat otonomi desa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu tujuan terpenting dalam pilkades adalah memilih pemimpin yang berkualitas. Kualitas pemimpin dapat diukur oleh berbagai instrumen seperti tingkat pendidikan dan kompetensi. Masyarakat di desa Besito telah melakukan pemilihan kepala desa, pada tanggal 30 Maret 2019 yang diikuti 3 (tiga) calon Kepala Desa, yang kemudian dimenangkan oleh H. Noor Choliz.

Dalam pencalonan kepala desa selalu saja dilakukan kampanye oleh kandidat untuk mensosialisasikan setiap visi dan misi mereka guna menarik perhatian dan simpatisan dari masyarakat. Di dalam masa kampanye kandidat calon kepala desa dan masyarakat berkesempatan bertemu langsung dan saling berdialog tentang visi dan misi yang ditawarkan oleh calon kandidat dan harapan dari masyarakat. Bertolak dari hasil observasi menunjukkan bahwa dalam pemilihan kepala desa yang dalam hal ini adalah pemilihan kepala desa cenderung diwarnai dengan beberapa alasan masyarakat untuk memilih calon tersebut, diantaranya adalah alasan karena kesamaan cara pandang, karena nasihat dari tokoh agama (kyai), dan karena ingin desa besito lebih maju dan unggul dalam perekonomian.

Dengan terungkapnya beberapa alasan masyarakat memilih calon kepala desa dalam pilkades menyebabkan konflik. Konflik terjadi karena adanya perbedaan pilihan atau terdapat perselisihan pendapat antar individu atau kelompok. Akar atau penyebab konflik di masyarakat diantaranya adalah

persoalan interpersonal yang dimiliki oleh setiap individu disebabkan karena dorongan psikologis yang bertentangan dalam interaksi sosial. Apalagi dalam konteks pemilihan dalam memilih pemimpin yang selaras dengan pemikiran individu satu dengan lainnya berbeda, yang mengakibatkan konflik terus berjalan tiada henti. Dalam konteks pilkades, konflik terjadi karena adanya perbedaan dalam memilih atau mendukung calon kepala desa. Saling acuh tak acuh, kontak secara fisik dan menghalangi pihak lain untuk memperoleh kemenangan merupakan contoh konflik yang terjadi menjelang dan sesudah berakhirnya pemilihan kepala desa. Konflik antar yang disebabkan oleh individu satu dengan lainnya disebut dengan konflik horisontal.

Dalam perjuangan untuk menegakkan demokrasi pada pemilihan kepala desa di Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, ini mengalami kegagalan. Dikatakan gagal karena terjadinya permusuhan atau konflik dalam sebuah demokrasi. Agar konflik dapat terselesaikan secara demokratis, ada kebutuhan adanya konsensus dan kesadaran untuk mencapai kompromi di setiap demokrasi. Inti dari konflik pada pemilihan kepala desa di Desa Besito Kecamatan Gebog, dari budaya politik demokratis adalah interaksi yang produktif antara masing-masing para pendukung calon kepala desa agar suatu permasalahan dapat terselesaikan. Diperlukan adanya pihak-pihak yang dapat mendamaikan atau mempersatukan kembali para pendukung yang sedang berkonflik.

Dengan melakukan mediasi kepada masyarakat di Desa Besito yang sedang berkonflik akibat dari pemilihan desa merupakan suatu proses yang paling produktif untuk dapat mempersatukan kembali masyarakat yang putus hubungan keluarganya agar silaturahmi dapat terjalin kembali. Di mana cara ini mungkin dapat diterima dengan baik oleh pihak-pihak yang sedang berkonflik. Suatu permasalahan atau permusuhan pasti ada penyelesaiannya di mana adanya pihak orang ketiga yang dapat mendamaikannya kembali masyarakat di Desa Besito. Resolusi yang dilakukan seperti dihadapkannya sosok kyai yang dapat menetralkan suasana yang belum kondusif pada setiap acara-acara seperti acara pernikahan, aqiqah, tahlilan, khutbah jum'at, pengajian dan acara-acara keagamaan lainnya.